

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini uji kualitas data menggunakan uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Multikolinieritas.

Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang kuat antara variabel bebas, hal itu dikarenakan akan mempengaruhi pada keakuratan penduga parameter, atau koefisien regresi dalam memperkirakan nilai yang sebenarnya. Uji ini berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti, diantara beberapa variabel atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi.

TABEL 5.1.
Hasil Uji Multikolinieritas

	GDP Per kapita	Angka Melek Huruf	Jalan Aspal	Pengangguran
GDP Per kapita	1	-0.3862	-0.2498	0.6323
Angka Melek Huruf	0.7524	1	0.1981	0.4953
Jalan Aspal	-0.3190	0.1981	1	-0.3087
Pengangguran	0.6323	0.4953	-0.3087	1

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada table 5.1. diatas, disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas. Dimana nilai koefisien korelasi variabel independent berada dibawah 0,85, sehingga model ini tidak terdapat multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas memiliki arti dalam suatu model terdapat perbedaan varian residual atas observasi. Dalam model penelitian, data yang baik seharusnya tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data *cross section*.

Uji park digunakan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam data panel. Dengan ketentuan nilai probabilitas dari semua variabel independen tidak signifikan pada tingkat 5%. Keadaan ini menunjukkan adanya varian yang sama atau terjadi homokedastisitas antara nilai-nilai variabel independen dengan residual setiap variabel itu sendiri. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 5.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Probabilitas
C	0.2140
PDRB	0.4356
Angka Melek Huruf	0.3226
Jalan Aspal	0.0999
Pengangguran	0.1644

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$, oleh karena itu data regresi penelitian tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB, angka melek huruf, jalan aspal, dan pengangguran sebagai variabel independen terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

B. Hasil Penelitian

1. Pemilihan Model Analisis.

Dalam data panel ada tiga macam pendekatan untuk memilih teknik estimasi. Pertama, uji statistik F atau Uji Chow yang digunakan untuk memilih antara metode *fixed effect* atau metode *common effect*. Kedua, Uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara metode *fixed effect* atau metode *random effect*. Ketiga, Uji Lagrange Multiplier (LM) yang digunakan untuk memilih antara metode *common effect* dan metode *random effect*.

a. Uji Chow.

Uji chow merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat antara *fixed effect* dengan *common effect*. Jika hasil menyatakan menerima hipotesis nol maka metode terbaik yang digunakan adalah metode *common effect*. Tetapi jika hasil menolak hipotesis nol maka metode terbaik yang digunakan dalam penelitian adalah *fixed effect*, kemudian akan berlanjut ke *uji hausman*.

TABEL 5.3.
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	409.348704	(4,21)	0.0000

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji chow pada table 5.3 diatas didapatkan bahwa nilai probabilitas *cross-section* F sebesar 0,0000 yang nilainya kurang dari 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Dapat diartikan bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan dalam hasil analisis ini daripada model *common effect*.

b. Uji Hausman.

Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk menentukan metode apa yang paling tepat antara metode *fixed effect* atau *random effect*. Apabila hasil menyatakan menerima hipotesis nol, maka metode yang paling tepat untuk digunakan adalah *random effect*. Namun, apabila hasil yang diperoleh menyatakan menolak hipotesis nol, maka model yang paling tepat digunakan adalah *fixed effect*.

TABEL 5.4.
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross section random	381.080277	4	0.0000

Sumber : Data Diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section* random adalah 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga menolak hipotesis nol yang artinya bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan daripada model *random effect*.

c. Analisis Model Data Panel.

Pemilihan model ini menggunakan uji analisis antara model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* yang akan dijelaskan pada uraian tabel di bawah ini :

TABEL 5.5.
Hasil Estimasi Model

Variabel dependen: Indeks Keuangan Inklusif	Model		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
PDRB	-0.134406	0.137701	-0.128562
Standar error	0.027715	0.029667	0.006132
T-statistic	-4.849644	4.641578	-20.96545
Probabilitas	0.0000	0.0001	0.0000
Angka Melek Huruf	0.036075	-0.000962	0.001607
Standar error	0.005924	0.001443	0.003265
T-statistic	6.089885	-0.666757	0.492279
Probabilitas	0.0000	0.5122	0.6268
Jalan Aspal	-0.354515	0.069623	-0.437691
Standar error	0.070802	0.018969	0.017201
T-statistic	-5.007142	3.670420	-25.44607
Probabilitas	0.0000	0.0014	0.0000
Pengangguran	0.061765	0.002284	0.057232
Standar error	0.026123	0.003260	0.005773
T-statistic	2.364447	0.700365	9.913040
Probabilitas	0.0258	0.4914	0.0000
R2	0.720787	0.995979	0.790065
F-Statistic		650.2267	23.52108
Prob (F-Stat)		0.000000	0.000000
Durbin-Watson Stat	1.150059	2.168727	0.826831

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan uji chow dan uji hausman dapat disimpulkan bahwa hasil dari masing-masing uji saling mendukung. Dari hasil uji chow menyarankan menggunakan model *Fixed effect*, dan dari uji hausman juga menyarankan menggunakan model *Fixed effect*. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 5.5, perbandingan antara ketiga model yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* bahwa nilai probabilitas masing masing variabel mengharuskan tidak lebih dari 0,05 (5%) dari tabel tersebut bahwa nilai *fixed effect* terdapat 2 variabel yang lebih dari 0,05 dan *random effect* terdapat 1 variabel yang lebih dari 0,05. Dan alasan pemilihan model *fixed effect* juga dapat dilihat dari koefisien determinasi, yaitu seberapa besar variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi yang dimiliki model *fixed* sebesar 0.995979 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan model *random* yang sebesar 0.790065.

2. Hasil Estimasi Model Regresi Panel.

Setelah pengujian statistik untuk menentukan model mana yang akan dipilih dalam penelitian ini, maka disimpulkan bahwa model *fixed effect* yang akan digunakan. Berikut disajikan tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 5 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode 2013 – 2018.

TABEL 5.6.
Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel Dependen : Indeks Keuangan Inklusif	Model Effect	Fixed
Konstanta		-1.419136
Standar error		0.217820
t-statistik		-6.515191
Probabilitas		0.0000
PDRB perKapita		0.137701
Standar error		0.029667
T-statistic		4.641578
Probabilitas		0.0001
Angka Melek Huruf		-0.000962
Standar error		0.001443
T-statistic		-0.666757
Probabilitas		0.5122
Jalan Aspal		0.069623
Standar error		0.018969
T-statistic		3.670420
Probabilitas		0.0014
Pengangguran		0.002284
Standar error		0.003260
T-statistic		0.700365
Probabilitas		0.4914
R²		0.995979
F-Statistic		650.2267
Prob (F-Stat)		0.000000
Durbin-Watson Stat		2.168727

Sumber : Data Diolah, 2020

Dari tabel di atas, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap analisis pengaruh PDRB, angka melek huruf, jalan aspal dan pengangguran terhadap keuangan inklusif di Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018 disimpulkan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_{1t} + b_2X_{2t} + b_3X_{3t} + b_4X_{4t} + \varepsilon \dots \dots \dots (11)$$

Keterangan :

Y = variabel dependen

α = konstanta

X1 = variabel independent 1

X2 = variabel independent 2

X3 = variabel independent 3

X4 = variabel independent 4

B(1...4) = koefisien regresi masing-masing variabel

e = *error term*

Indeks Keuangan Inklusi = -1.419136 + 0.137701*PDRBPerkapita -
0.000962*Angka Melek Huruf + 0.069623*Jalan Aspal +
0.002284*Pengangguran

Indeks Keuangan Inklusif_Bantul = -0.204166 -1.419136 +
0.137701*PDRBPerkapita_Bantul -0.000962*Angka Melek Huruf_Bantul
+ 0.069623*Jalan Aspal_Bantul + 0.002284*Pengangguran_Bantul

$$\begin{aligned} \text{Indeks Keuangan Inklusi}_{\text{Sleman}} &= -0.216528 - 1.419136 + \\ &0.137701 * \text{PDRBPerkapita}_{\text{Sleman}} - 0.000962 * \text{Angka Melek Huruf}_{\text{Sleman}} \\ &+ 0.069623 * \text{Jalan Aspal}_{\text{Sleman}} + \\ &0.002284 * \text{Pengangguran}_{\text{Sleman}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Keuangan Inklusi}_{\text{Gunungkidul}} &= 0.388046 - 1.419136 + \\ &0.137701 * \text{PDRBPerkapita}_{\text{Gunungkidul}} - 0.000962 * \text{Angka Melek Huruf}_{\text{Gunungkidul}} \\ &+ 0.069623 * \text{Jalan Aspal}_{\text{Gunungkidul}} + \\ &0.002284 * \text{Pengangguran}_{\text{Gunungkidul}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Inklusi Keuangan}_{\text{Kulonprogo}} &= -0.175742 - 1.419136 + \\ &0.137701 * \text{PDRBPerkapita}_{\text{Kulonprogo}} - 0.000962 * \text{Angka Melek Huruf}_{\text{Kulonprogo}} \\ &+ 0.069623 * \text{Jalan Aspal}_{\text{Kulonprogo}} + \\ &0.002284 * \text{Pengangguran}_{\text{Kulonprogo}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks Inklusi Keuangan}_{\text{Kotayogyakarta}} &= 0.208390 - 1.419136 + \\ &0.137701 * \text{PDRBPerkapita}_{\text{Kotayogyakarta}} - 0.000962 * \text{Angka Melek Huruf}_{\text{Kotayogyakarta}} \\ &+ 0.069623 * \text{Jalan Aspal}_{\text{Kotayogyakarta}} + \\ &0.002284 * \text{Pengangguran}_{\text{Kotayogyakarta}} \end{aligned}$$

Dari hasil diatas dapat diketahui pengaruh dari variabel *cross-section* yang berbeda dari setiap kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan efek paling besar terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kabupaten Gunungkidul dengan memberikan efek sebesar 0.388046 , kemudian disusul Kota Yogyakarta dengan

memberikan efek sebesar 0.208390 terhadap keuangan inklusif di Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Tiga Kabupaten di DIY memberikan efek yang negatif terhadap keuangan inklusif di DIY, dimana Kabupaten Bantul memberikan efek sebesar -0.204166, Kabupaten Sleman memberikan efek sebesar -0.216528, Kabupaten Kulonprogo memberikan efek sebesar -0.175742 terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Nilai *cross-section* ini menentukan besarnya pengaruh atau efek wilayah terhadap indeks keuangan inklusi. Jika diurutkan dari wilayah yang memberikan kontribusi paling besar adalah Kabupaten Gunungkidul dengan memberikan efek sebesar 0.388046. Sedangkan wilayah yang memberikan kontribusi paling kecil adalah Kabupaten Kulon Progo memberikan efek sebesar -0.216528 indeks keuangan inklusif.

Selain itu, Variabel yang mendominasi dari penelitian ini adalah PDRB Perkapita, dimana memiliki nilai koefisien yang paling besar diantara variabel lain. Nilai koefisien PDRB Perkapita pada penelitian ini adalah 0.137701. sedangkan untuk variabel lain yaitu angka melek huruf bernilai -0.000962, jalan aspal bernilai 0.069623 dan pengangguran bernilai 0.002284. Hal ini menunjukkan PDRB Perkapita pada penelitian ini menjadi variabel yang mendominasi dibandingkan dengan variabel lainnya.

3. Uji Statistik

a. Uji t-statistik.

Uji t-statistik bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independent secara individual dalam menerangkan variabel dependent.

TABEL 5.7.
Hasil Uji t-statistik

Variabel	Koefisien regresi	Prob.	Standar Prob.
PDRB perKapita	0.137701	0.0001	0,05
Angka Melek Huruf	-0.000962	0.5122	0,05
Jalan Aspal	0.069623	0.0014	0,05
Pengangguran	0.002284	0.4914	0,05

Sumber : Data Diolah, 2020

Dari tabel 5.7 diatas dapat diketahui bahwa hasil t-statistik untuk variabel independen sebagai berikut :

- 1) Pengaruh PDRB perKapita terhadap keuangan inklusif di Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh variabel PDRB perKapita memiliki koefisien regresi sebesar 0.137701 dengan probabilitas sebesar 0,0001 yang signifikan pada taraf 5 persen. Variabel PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap keuangan inklusi Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta . Hal ini berarti bila variabel PDRB naik sebesar 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan pada keuangan inklusif sebesar 0.186409.
- 2) Pengaruh angka melek huruf terhadap keuangan inklusif di Kabupaten Daerah Istmewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis yang

dilakukan menunjukkan bahwa variabel angka melek huruf memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0.000962 dengan nilai probabilitas sebesar $0,5122$ yang tidak signifikan pada taraf 5 persen. Hal ini menyatakan bahwa angka melek huruf berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keuangan inklusif di kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 3) Pengaruh jalan aspal terhadap keuangan inklusif di kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jalan aspal memiliki koefisien regresi positif sebesar 0.069623 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0014 yang signifikan pada taraf 5 persen. Variabel jalan aspal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.. Hal ini berarti bila jalan aspal naik sebesar 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan pada keuangan inklusif sebesar 0.069623 .
- 4) Pengaruh pengangguran terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki koefisien regresi positif sebesar 0.002284 dengan nilai probabilitas sebesar 0.4914 yang tidak signifikan pada taraf 5 persen Hal ini menyatakan bahwa Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keuangan inklusif di kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Uji F-statistik.

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independent secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect* dimana dalam estimasi model nilai probabilitas F-statistik adalah sebesar 0,000000. Hal ini berarti bahwa variabel independen PDRB Perkapita, Angka Melek Huruf, Jalan Aspal, Pengangguran secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Inklusi Keuangan).

c. Koefisien Determinasi.

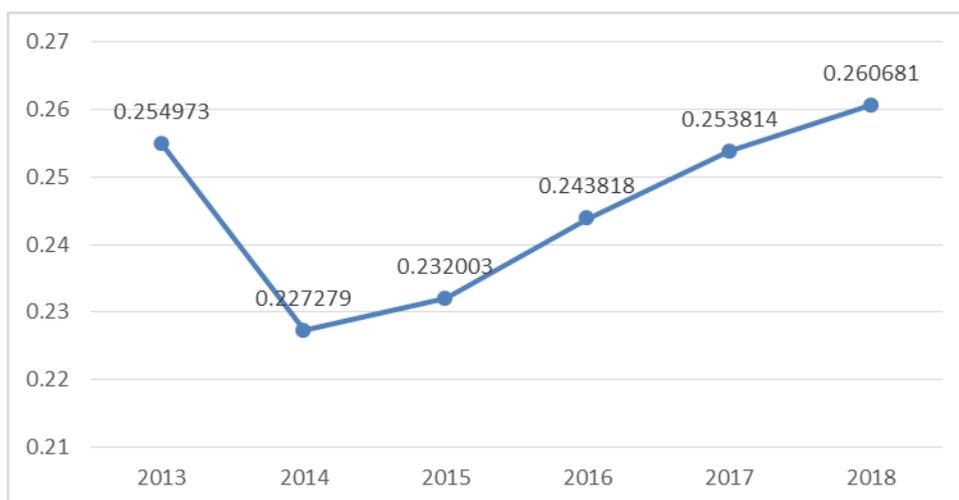
Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan himpunan variasi variabel dependen. Dari hasil estimasi model *fixed effect* pada tabel 5.6 di atas dapat diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0.995979. Hal ini berarti perubahan keuangan inklusif di Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 99,59 persen dipengaruhi oleh PDRB, angka melek huruf, jalan aspal, dan pengangguran, sedangkan sisanya sebesar 0,41 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

C. Pembahasan

1. Tingkat Keuangan Inklusif Antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

Indeks keuangan inklusif dihitung dengan menggunakan 3 dimensi yaitu dimensi penetrasi perbankan, dimensi ketersediaan jasa perbankan, dan

dimensi penggunaan jasa perbankan. Nilai indeks keuangan inklusif dari 4 Kabupaten dan satu kota madya yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 sampai dengan 2018 menunjukkan angka <0,3 yang tergolong rendah. Pada umumnya nilai indeks keuangan inklusif dari tahun 2013 sampai dengan 2018 sudah mengalami peningkatan, hanya saja peningkatan nilai indeks keuangan inklusif ini tidak begitu signifikan. Pada tahun 2013 nilai indeks keuangan inklusif di Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 0,2549 dan menjadi 0,2606 pada tahun 2018.



Sumber : Data Diolah, 2020

GAMBAR 5.1.

Indeks Keuangan Inklusi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada gambar di atas, indeks keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta secara garis besar mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Peningkatan indeks keuangan inklusif tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan inklusifitas jasa perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adanya peningkatan indeks keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada perbankan, disebabkan oleh adanya peningkatan pada setiap dimensi keuangan inklusif yaitu dimensi penetrasi perbankan, dimensi ketersediaan jasa perbankan, dan dimensi penggunaan jasa perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan ini juga mencerminkan bahwa akses dan penggunaan jasa perbankan mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan semakin berkembangnya sektor perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

TABEL 5.8.
 Nilai Dimensi Indeks Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018

Tahun	Dimensi Keuangan Inklusif		
	Penetrasi Perbankan	Ketersediaan Jasa Perbankan	Kegunaan
2013	0.2778	0.2282	0.2573
2014	0.1475	0.2267	0.2808
2015	0.1646	0.2206	0.2900
2016	0.1686	0.2219	0.3123
2017	0.1797	0.2191	0.3347
2018	0.1859	0.2139	0.3549

Sumber : Data Diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan nilai setiap dimensi yang dicapai oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengadopsi dari penelitian Sarma (2012), dalam penelitian ini, masing-masing dimensi dibagi kedalam 3 kategori, yaitu tinggi ($0,6 < d_i \leq 1$), sedang ($0,3 \leq d_i \leq 0,6$), dan rendah ($< 0,3$). Ketiga dimensi menunjukkan dalam kategori sedang. Dari data diatas dapat diketahui bahwa dimensi penetrasi jasa perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta

paling rendah jika dibandingkan dengan dimensi penggunaan jasa perbankan dan dimensi ketersediaan jasa perbankan, yaitu dengan rata-rata sebesar 0,1873 Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki rekening perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah.

a. Dimensi Penetrasi Perbankan.

Dimensi pertama dari perhitungan indeks keuangan inklusif adalah dimensi penetrasi perbankan yang mencerminkan banyaknya penggunaan jasa perbankan. Penetrasi perbankan akan semakin baik apabila pengguna jasa keuangan semakin banyak. Salah satu tolok ukur untuk dimensi penetrasi perbankan adalah jumlah rekening deposit yang ada dalam perbankan.

TABEL 5.9.

Dimensi Penetrasi Perbankan Tingkat Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2018

Tahun	Bantul	Sleman	Gunungkidul	Kulonprogo	Kota Yogyakarta
2013	0,0864	0,1856	0,0364	0,0805	1,0000
2014	0,0531	0,1167	0,0238	0,0508	0,4932
2015	0,0605	0,1315	0,0259	0,0650	0,5400
2016	0,0673	0,1366	0,0263	0,0668	0,5459
2017	0,0722	0,1469	0,0283	0,0836	0,5676
2018	0,0756	0,1555	0,0284	0,0885	0,5815

Sumber : Data Diolah, 2020

Dapat diketahui dari tabel diatas menunjukkan bahwa hanya satu wilayah di Daerah Istimewa Yoyakarta yang termasuk kategori tinggi yaitu Kota Yogyakarta sedangkan untuk 4 kabupaten lainnya termasuk dalam kategori rendah karena berada diposisi $<0,3$. Penetrasi perbankan yang paling tinggi terdapat di Kota Yogyakarta yang berkisar antara 0,49-1

pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Adanya sebagian besar mengalami peningkatan pada dimensi penetrasi perbankan di Kota Yogyakarta menunjukkan penggunaan jasa bank semakin meningkat. Semakin jumlah penggunaan jasa perbankan yang semakin banyak, peningkatan ini juga dapat disebabkan oleh individu yang awalnya memiliki satu rekening pada perbankan menjadi lebih dari satu.

Tingginya penetrasi perbankan di Kota Yogyakarta disebabkan oleh aktivitas perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta berpusat di Kota Yogyakarta. Sementara itu, 4 Kabupaten lainnya seperti Kab. Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo memiliki penetrasi perbankan yang rendah. Populasi yang tinggi menjadi salah satu penyebab rendahnya dimensi penetrasi bila tidak diikuti dengan jumlah depositor yang tinggi pula. Dari 4 Kabupaten tersebut yang Nilai dimensi penetrasi paling rendah diperoleh oleh Kab. Gunungkidul yang berkisar diantara 0,02 – 0,03 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

b. Dimensi Ketersediaan Jasa Perbankan.

Dimensi kedua dalam perhitungan indeks keuangan inklusif adalah dimensi ketersediaan jasa perbankan. Keberadaan jasa perbankan merupakan hal yang penting dalam keuangan inklusif. Indikator yang digunakan dalam dimensi ketersediaan jasa perbankan adalah jumlah kantor cabang bank.

TABEL 5.10.
Dimensi Ketersediaan Jasa Perbankan Tingkat Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2018

Tahun	Bantul	Sleman	Gunungkidul	Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2013	0.0189	0.0545	0.0253	0.0420	1,000
2014	0.0183	0.0685	0.0247	0.0412	0.9806
2015	0.0182	0.0681	0.0244	0.0430	0.9488
2016	0.0269	0.0598	0.0237	0.0425	0.9564
2017	0.0266	0.0591	0.0235	0.0420	0.9442
2018	0.0259	0.0657	0.0231	0.0415	0.9131

Sumber : Data diolah,2020

Keberadaan kantor cabang bank yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari data diatas dapat diketahui bahwa dimensi ketersediaan jasa perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang paling tinggi dimiliki oleh Kota Yogyakarta yang berkisaran antara 0,9-1 pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Sementara itu, negara dengan dimensi ketersediaan paling rendah diperoleh Kab. Bantul dengan angka kisaran 0,01-0,02 pada kurun waktu 2013-2018. Jumlah kantor cabang suatu daerah berhubungan dengan jumlah pemakai jasa perbankan. Namun banyaknya kantor cabang belum cukup menggambarkan luas persebaran layanan perbankan. Oleh karena itu untuk mengetahui berapa banyak individu yang dapat menjangkau perbankan, jumlah kantor cabang yang ada dibagi dengan jumlah populasi dewasa wilayah tersebut.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki dimensi ketersediaan yang tergolong rendah yakni $< 0,3$ sedangkan satu-satunya yang memiliki nilai dimensi ketersediaan yang tinggi adalah Kota Yogyakarta dengan nilai

dimensi > 0,6. Meskipun demikian, dimensi ketersediaan di beberapa negara dikurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Artinya, hal ini mengindikasikan peningkatan dalam fasilitas fisik perbankan untuk menjangkau masyarakat.

c. Dimensi Penggunaan Jasa Perbankan.

Dimensi yang ketiga dari keuangan inklusif adalah penggunaan jasa perbankan. Banyak orang yang memiliki akses ke dalam perbankan tetapi tidak menggunakan jasa tersebut karena berbagai alasan seperti jarak yang jauh dari tempat tinggal, produk yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, atau memiliki pengalaman yang buruk dengan penyedia jasa keuangan. Indikator yang digunakan dalam penghitungan dimensi ini adalah jumlah tabungan dan kredit yang disalurkan perbankan.

TABEL 5.11.
Dimensi Penggunaan Jasa Perbankan Tingkat Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2018

Tahun	Bantul	Sleman	Gunungkidul	Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2013	0.0944	0.1277	0.7236	0.1114	0.2292
2014	0.0992	0.1438	0.8092	0.1141	0.2376
2015	0.1077	0.1598	0.8109	0.1249	0.2466
2016	0.1190	0.1763	0.8376	0.1616	0.2667
2017	0.1279	0.1805	0.9170	0.1709	0.2768
2018	0.1377	0.1887	1,000	0.1696	0.2784

Sumber : Data Diolah, 2020

Menurut table 5.11 wilayah yang memiliki dimensi kegunaan paling tinggi yaitu Kab. Gunungkidul dengan nilai dimensi menyentuh angka 1. Dan negara dengan dimensi penggunaan jasa perbankan terendah

di Daerahh Istimewa Yogyakarta adalah Kab. Bantul dengan nilai 0,0944 pada tahun 2013 dan pada tahun 2018 menjadi 0,1377.

d. Indeks Keuangan Inklusif antar Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rendahnya tingkat keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disebabkan masih banyaknya penduduk yang belum mendapatkan akses layanan jasa perbankan. Hal ini dikarenakan adanya hambatan geografis dari beberapa Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan negara dengan kondisi perbukitan sehingga biaya pendirian kantor cabang mahal. Selain hambatan geografis juga karena persyaratan yang ketat, proses yang kompleks, dan formalitas yang ringgi juga menjadi hambatan.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks keuangan inklusif empat Kabupaten dan satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong rendah. Tiga Kabupaten yang masih tergolong rendah, yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo dengan nilai rata rata keuangan inklusif mencapai 0,07, 0,12, dan 0,09. Rendahnya indeks keuangan inklusif menunjukkan penyebaran dan pemanfaatan jasa pebankan yang masih rendah. Perbedaan indeks keuangan inklusif antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewaa Yogyakarta menunjukkan masih terjadinya ketimpangan pada akses jasa perbankan antar negara. Berikut indeks keuangan inklusif berdasarkan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewaa Yogyakarta.

TABEL 5.12

Indeks Keuangan Inklusi berdasarkan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2018

Tahun	Bantul	Sleman	Gunungkidul	Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2013	0.0703	0.1274	0.3056	0.0803	0.6910
2014	0.0610	0.1116	0.3316	0.0720	0.5598
2015	0.0668	0.1224	0.3326	0.0810	0.5678
2016	0.0754	0.1281	0.3412	0.0964	0.5777
2017	0.0804	0.1330	0.3665	0.1048	0.5841
2018	0.0852	0.1406	0.3911	0.1057	0.5805

Sumber : Data Diolah, 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa Nilai indeks keuangan inklusif tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta. Untuk kategori sedang adalah Kab. Gunungkidul. Hal ini terjadi karena Kota Yogyakarta unggul dalam dimensi pembentuk indeks inklusi keuangan inklusif. Tingginya indeks keuangan inklusif di Kota Yogyakarta juga menunjukkan terdapat kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses jasa keuangan. Kab. Bantul termasuk dalam kategori paling rendah. Rendahnya indeks inklusi keuangan negara tersebut menunjukkan askes terhadap jasa keuangan masih sulit.

Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat adalah meningkatkan layanan akses perbankan. Semakin mudah akses keuangan akan memberikan dampak kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Semakin banyak masyarakat yang ikut andil dalam menggerakkan roda perekonomian dan

memperbesar peluang negara meningkatkan pendapatan, dengan begitu pengentasan kemiskinan bisa tercapai.

2. Pengaruh PDRB per Kapita terhadap Keuangan Inklusif

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini sejalan dengan penelitian Park dan Mercado (2015) dan Chithra dan Selvam (2013) yang dilakukan oleh yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh terhadap keuangan inklusif.

Pendapatan dapat menjelaskan kondisi keuangan inklusif suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita dari suatu wilayah maka akan semakin tinggi tingkat keuangan inklusifnya. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tren PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga mengakibatkan keuangan inklusif yang mengalami peningkatan. Tingginya pendapatan per kapita suatu negara menjadi tolok ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan menunjukkan kinerja perekonomian membaik. Kondisi perkonomian yang semakin baik menjadi tanda bagi perbangkan untuk memperluas jaringan sehingga akses ke perbankan akan semakin terbuka.

Selain itu, peningkatan PDRB juga menggambarkan peningkatan pada produktivitas masyarakat. Semakin produktif masyarakat dalam aktivitas perekonomian, akan semakin besar pula peluang masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. Kesempatan masyarakat untuk

menggunakan jasa perbankan semakin besar, baik digunakan untuk menabung, investasi, ataupun keperluan transaksi lainnya. Selain itu, peningkatan PDRB juga menggambarkan peningkatan pada produktivitas masyarakat. Semakin produktif masyarakat dalam aktivitas perekonomian, akan semakin besar pula peluang masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. Kesempatan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan semakin besar, baik digunakan untuk menabung, investasi, ataupun keperluan transaksi lainnya

3. Pengaruh Angka Melek Huruf terhadap Keuangan Inklusif

Berdasarkan penelitian diatas, variabel Angka Melek Huruf berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ummah dkk. (2015) yang menyatakan angka melek huruf tidak berpengaruh signifikan terhadap keuangan inklusi.

Hasil penelitian ini menandakan bahwa angka melek huruf yang tinggi tidak berpengaruh terhadap keuangan inklusif. Hal ini bisa dikarenakan masyarakat yang bisa membaca dan menulis (melek huruf) memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Sanjaya (2014) menyebutkan bahwa pendidikan berperan penting tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam perbaikan kesenjangan sosial. Pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan juga berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan keterampilan dan produktivitas

masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan individu untuk mengakses perbankan tidak serta merta ditentukan oleh kemampuan membaca menulis, namun lebih kepada keinginan individu terkait untuk ikut andil dalam lembaga keuangan.

4. Pengaruh Jalan Aspal terhadap Keuangan Inklusif

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat dijelaskan bahwa variabel Jalan Aspal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarma dan Pias (2011) dan Chithra dan Selvam (2013) yang menyatakan bahwa rasio panjang jalan berpengaruh terhadap keuangan inklusif.

Akses ke layanan keuangan perbankan memerlukan infrastruktur dasar yang ada. Jalan aspal dapat dijadikan sebagai infrastruktur fisik yang umum di suatu daerah. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang berperan penting dalam sektor perhubungan. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan dalam pendistribusian barang dan mobilitas penduduk. Selain itu, jalan beraspal merupakan persyaratan dasar dalam mendirikan cabang bank dan jaringan ATM di daerah pedesaan dan penduduk yang kurang padat. Dengan demikian semakin baik kondisi jalan suatu daerah akan memudahkan akses masyarakat pada lembaga keuangan. Alasan yang lain adalah karena masih banyak masyarakat yang lebih suka ke kantor cabang dan ATM dibandingkan dengan menggunakan

layanan internet. Karena masih banyak masyarakat yang belum menggunakan layanan online .

5. Pengaruh Pengangguran terhadap Keuangan Inklusif

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat dijelaskan bahwa variabel Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini sejalan dengan penelitian dan Chithra dan Selvam (2013) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keuangan inklusif.

Maknanya semakin rendah tingkat pengangguran maka semakin rendah pula tingkat inklusinya. Menurunnya tingkat pengangguran berarti meningkatnya tenaga kerja atau jumlah pekerja. Meningkatnya tenaga kerja atau jumlah pekerja diikuti oleh menurunnya tingkat upah atau penghasilan. Penghasilan yang rendah dan tidak stabil akan membuat masyarakat memiliki rasa ketidakmampuan dalam mengakses layanan keuangan karena penghasilannya yang rendah hanya diprioritaskan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya saja. Sehingga ada rasa ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan karena dipengaruhi oleh pendapatannya yang rendah dan tidak stabil. Kurangnya minat akan jasa lembaga keuangan menyebabkan kurang meratanya penyebaran lembaga formal keuangan yang menyebabkan tingkat inklusi keuangan pun menjadi rendah atau menurun. Sehingga penurunan tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat inklusi keuangan.